

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKSI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR PERIODE 2011-2015)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

Dhita Agustina

B 300130174

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKSI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR PERIODE 2011-2015)**

NASKAH PUBLIKASI

oleh:

DHITA AGUSTINA
B 300 130 151

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**

Dr. Didit Purnomo, Se M Si

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKSI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR PERIODE 2011-2015)**

DHITA AGUSTINA

B 300 130 174

**Telah diperiksa didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari 2017**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DEWAN PENGUJI

1. **Penguji I:**
Ir. Maulidyah Indira H, MS
(Ketua)
2. **Penguji II:**
Muhammad Arif, SE. M Ec. Dev
(Sekertaris)
3. **Penguji III:**
Dr. Didit Purnomo,Se M Si
(Anggota)

()
()
()

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



(Dr. Syamsudin)

NIK: 195702171986031001

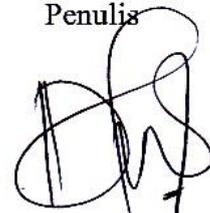
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2017

Penulis



Dhita Agustina
B 300130174

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR PERIODE 2011-2015)

Abstrak

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Metode penelitian ini dengan desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan softcopy Pengeluaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel (gabungan data cross section dan time series). Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah dari seluruh populasi pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2011 – 2015. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan program Eviews7. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil estimasi data panel maka terpilih model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Uji kebaikan model PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Uji Validitas pengaruh (uji t) menunjukan PAD dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serentak mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Abstract

This research will examine the effect of Local Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds to Local Government Expenditures in East Java. This research method with this research design is kind of quantitative research by doing hypothesis test. The data used is secondary data by looking at the Budget Realization report and softcopy of District / Municipal Government Expenditure in East Java Province. This study uses panel data (combined cross section data and time series). The population of this study is all districts and cities in East Java Province. The sample of this study is from the entire population of district and city governments to be sampled in accordance with the criteria from 2011 to 2015. Sample determination is done by using purposive sampling method. The analysis tool used is panel data regression analysis using Eviews7 program. The result of data analysis shows that the result of panel data estimation then chosen the best model that is Fixed Effect Model (FEM). The goodness test of PAD, DAU and DAK model has significant effect to the PAD in East Java Province in 2011-2015. Test Validity of influence (t test) shows PAD and General Allocation Fund has a significant positive effect on Local Government Expenditure while Special Allocation Fund has an insignificant positive influence on Regional Government Expenditure. The results showed that PAD, General Allocation Fund,

and Special Allocation Fund simultaneously affect Regional Government Expenditure in East Java Province in 2011-2015.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Local Government Expenditures*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai

salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen maka penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*) dengan data panel.

$$PPD_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

- PPD_{it} : Jumlah Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
- PAD_{it} : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
- DAU_{it} : Jumlah Penduduk di wilayah ke-i dan waktu ke-t
- DAK_{it} : Jumlah Dana Alokasi Khusus di wilayah ke-i dan waktu ke-t
- I : Menunjukkan Kota/Kabupaten.
- t : Menunjukkan deret waktu 2011-2015
- β_{0i} : Koefisien intersep atau konstanta yang bersifat random
- β : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing
- μ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda dengan metode *Fixed Effect Method* (FEM) untuk melihat sejauh mana pengaruh jumlah pertumbuhan ekonomi, pendapatn asli daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013. Hasil estimasi data panel dengan tiga metode dapat dilihat PPD Tabel 4.2

Tabel 1
Hasil Estimasi Data Panel

Variabel	Koefisien Model		
	PLS	FEM	REM
C	0,966324	3,639381	2,020638
PAD	0,305390	0,395978	0,332411
DAU	0,0665055	0,419769	0,589755
DAK	0,053792	0,015047	0,020638
R ²	0,948314	0,985558	0,930101
Prob. F-Statistik	0,000000	0,000000	0,000000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 0,395978 +0,419769. Dengan demikian bisa disimpulkan apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 1 maka PPD naik sebesar 0,395978 sedangkan apabila variabel Dana Alokasi Umum (DAU) naik 1 rupiah maka PPD naik sebesar 0,419769 rupiah dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) naik 1 rupiah maka PPD naik sebesar 0,015047 rupiah.

Uji Chow digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling baik antara *Pooles Least Squared* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengolahan Uji Chow adalah :

Tabel 2
Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	10,315654	-37,148	0,0000
Cross-section Chi-square	240,986195	37	0,0000

Output regresi data panel nilai *p-value* sebesar $0.0000 < 0.01$, maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect model*

Uji Hausman digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengolahan Uji Hausman adalah :

Tabel 3
Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	20,372476	3	0,0001

Output regresi data panel nilai *p-value* sebesar $0.0000 < 0.01$, maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect Method*. Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, maka terpilih model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Method*.

Hasil Estimasi Model terpilih (Model *FEM*) secara lengkap dapat dilihat PPD

Tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Estimasi FEM

$\text{PPD}_{it} = 3,639381 + 0,395978 \text{ PAD}_{it} + 0,419769 \text{ DAU}_{it} - 0,015047 \text{ DAK}_{it}$		
$(0,0000)^* \quad (0,0000)^* \quad (0,1914)$		
$R^2 = 0,985558$	$F = 48.65157$	$\text{Prob. F} = 0,00000$
Time Series Fixed Dummy Variable		
No.	Dateid	Effect
1	2011-01-01	6665.632
2	2012-01-01	-64209.25
3	2013-01-01	-69128.22
4	2014-01-01	-32827.46
5	2015-01-01	159499.3
Konstanta Time Series		
No.	Dateid	Konstanta
1	01-01-11	6669,271
2	01-01-12	-64205,6
3	01-01-13	-69124,6
4	01-01-14	-32823,8
5	01-01-15	159502,9

Keterangan :

Angka dalam kurung prob. t ; * signifikan PPD α 0,05

Dari Uji Validitas pengaruh di muka variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU). Dari Tabel diatas terlihat variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing memiliki koefisien regresi 0,395978 +0,419769. Dengan demikian bisa disimpulkan apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 1 maka PPD naik sebesar 0,395978 sedangkan apabila variabel Dana Alokasi Umum (DAU) naik 1 rupiah maka PPD naik sebesar 0,419769 rupiah dan variabel Dana Alokasi Khusus

(DAK) naik 1 rupiah maka PPD naik sebesar 0,015047rupiah. Variasi konstanta dari periode waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam setiap periode terjadi perubahan struktur regresi. Pada tahun 2011 terlihat konstanta regresi Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) adalah yang tertinggi, yakni 6669,271, artinya pada tahun ini Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) cenderung paling besar. dan pada tahun 2014 terlihat konstanta regresi Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) adalah yang terendah yakni -32823,8, artinya pada tahun ini kemiskinan cenderung paling kecil.

3.1 Interpretasi Ekonomi

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Nilai Pendapatan Asli Daerah usaha berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) di Provinsi Jawa Timur PPD tahun 2011-2015. Ada keterkaitan atau pengaruh antara Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil analisis tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Lugastoro (2013), Ardiansyah dkk (2015), Bambang Agus Pramuka (2010) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD semakin meningkat akan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pengeluaran Pemerintah Daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas

pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana Alokasi Umum berpengaruh negative signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Penyebabnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, dimana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi, sedangkan tingkat kematiannya juga masih tinggi namun relatif sudah jauh lebih rendah. Hasil penelitian secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan berubung positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah jadi apabila jumlah Dana Alokasi Umum meningkat maka Pengeluaran Pemerintah Daerah juga ikut meningkat.

Berdasarkan hasil analisis konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Lugastoro (2013), Ardiansyah dkk (2015) yang menyatakan hasil bahwa Dana Alokasi Umum secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kusnandar Dodik Siswantoro (2011) yang diperoleh Dana Alokasi Umum secara individu yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit sekolah dan upaya perluasan lapangan kerja.

3.1.3 Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK)

Nilai Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Dana Alokasi Khusus sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan daerahnya.

Berdasarkan hasil analisis tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Lugastoro (2013), Ardiansyah dkk (2015) yang

menyatakan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Semakin besar keluaran DAK akan mempengaruhi peningkatan Pengeluaran Pemerintah Daerah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil estimasi data panel maka terpilih model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*.
2. Berdasarkan uji kebaikan model PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.
3. Nilai koefisien determinasi R-squared (R^2) sebesar 0,985558 atau 98,5558 persen. Artinya variasi Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya 1,4442% dijelaskan oleh variabel lain di luar model statistic
4. Uji Validitas pengaruh (uji t) tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah, Investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serentak mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiharsono S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadi, Sutrisno, 2008, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul, 2009, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- M. Munandar , 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Maryadi, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*, Jurnal, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Meianto, Edy, Betri, Cherrya Dhia Wenny, 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*, Jurnal, Palembang: STIE Multi Data Palembang.
- Pralita, Dyah 2002, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Di Pemerintahan Pekalongan*.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). FakultasEkonomi UNDIP: Semarang.
- Setyowati, Lilis, Yohana Kus Suparwati. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Prestasi Vol. 9 No 1 - Juni 2012. ISSN 1411 -1497.
- Siswantoro, Dodik & Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin
- Sudarwadi, Hustianto. 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan*

Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014). ISBN: 978-602-17129-5-5

Sularmi 2006, Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan.

Sularso, Havid dan Restianto E, Yanuar, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Susetya, Didik 2008, Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.

Wahyuni 2009, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang.